

ANALISIS PENERAPAN SAK EMKM PADA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (Studi Pada UMKM di Kecamatan Sonder)

Princessha Baby Menajang¹, Aprili Bacilius²

¹²³Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado

Email: babycathleen12@gmail.com¹, aprilibacilus@unima.ac.id²

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada pelaku UMKM di Kecamatan Sonder, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang mereka hadapi dalam mengimplementasikan standar tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi terhadap sepuluh pelaku UMKM yang dijadikan informan. Analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang mencakup tahap kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diverifikasi melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Kecamatan Sonder belum menerapkan SAK EMKM secara menyeluruh dalam pengelolaan keuangannya.

Kata kunci: SAK EMKM; penerapan; UMKM; kendala; Kecamatan Sonder

Abstract : *This study aims to determine and analyze how the Financial Accounting Standards for Micro, Small, and Medium Entities (SAK EMKM) are applied to MSMEs in Sonder District, and to identify the obstacles they face in implementing these standards. The method used is a descriptive qualitative approach. Data collection was conducted through in-depth interviews, direct observation, and documentation of ten MSMEs who served as informants. Data analysis follows the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana (2014), which includes the stages of data condensation, data presentation, and conclusions. Data validity was verified through source triangulation and technical triangulation. The results show that most MSMEs in Sonder District have not yet implemented SAK EMKM comprehensively in their financial management.*

Keywords: *SME Financial Accounting Standards (SAK); implementation; SMEs; obstacles; Sonder District*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan yang sangat vital dalam struktur perekonomian Indonesia. Sektor ini tidak hanya menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi domestik, tetapi juga menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di negeri ini. Data dari Kementerian Koperasi dan UMKM mencatat bahwa sektor UMKM menyumbang lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menampung lebih dari 97 persen angkatan kerja Indonesia. Angka-angka ini secara gamblang menunjukkan betapa sentral dan tidak tergantikannya peran UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional, termasuk di provinsi Sulawesi Utara.

Di Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa, berbagai jenis UMKM terus tumbuh seiring dengan dinamika ekonomi masyarakat setempat. Mulai dari usaha kuliner khas Minahasa, perdagangan kebutuhan pokok, hingga usaha peternakan — semuanya berkembang secara organik di wilayah ini. Sayangnya, pertumbuhan tersebut belum selalu disertai dengan pengelolaan keuangan yang terstruktur dan memadai. Sebagian besar pelaku usaha masih mengandalkan pencatatan yang sangat sederhana, bahkan banyak yang tidak memisahkan kas usaha dari kas pribadi, sehingga sulit untuk mengetahui kondisi keuangan usaha secara akurat.

Namun demikian, sejumlah penelitian yang telah dilakukan di berbagai daerah menunjukkan bahwa penerapan SAK EMKM di tingkat pelaku usaha masih jauh dari harapan. Hamongsina, Sumual, dan Tala (2022) menemukan bahwa usaha yang menjadi objek penelitiannya di Kabupaten Minahasa Utara hanya melakukan pencatatan sederhana tanpa merujuk pada SAK EMKM. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Simanjuntak, Sumual, dan Bacilius (2021) dalam

penelitian pada UMKM Restoran Delli Tomohon, yang mendapati bahwa pelaku usaha belum memahami maupun menerapkan SAK EMKM secara menyeluruh.

Kondisi di Kecamatan Sonder tampaknya tidak jauh berbeda. Berdasarkan observasi awal, pelaku UMKM di wilayah ini umumnya hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran harian tanpa standar yang jelas. Belum ada pemisahan yang tegas antara keuangan usaha dan keuangan pribadi pemilik, apalagi penyusunan laporan keuangan yang lengkap sesuai SAK EMKM. Kondisi ini pada akhirnya menjadi penghambat bagi pelaku UMKM dalam mengakses kredit dari lembaga keuangan formal maupun dalam mengelola usahanya secara lebih profesional dan terukur.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini dirancang untuk menggali secara mendalam kondisi aktual penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kecamatan Sonder sekaligus mengidentifikasi hambatan-hambatan spesifik yang dihadapi pelaku usaha setempat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kecamatan Sonder? dan (2) Apa saja kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam menerapkan SAK EMKM di Kecamatan Sonder? Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merancang program pembinaan UMKM yang lebih tepat sasaran dan efektif.

KAJIAN TEORI

Teori Institusional

Teori institusional, yang pertama kali dikembangkan oleh Meyer dan Rowan (1977) kemudian diperluas oleh DiMaggio dan Powell (1983), menjelaskan bahwa suatu organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh tekanan efisiensi ekonomi semata, melainkan juga oleh tekanan-tekanan dari lingkungan sosial, norma, budaya, dan regulasi yang melingkupinya. Dalam kerangka teori ini, organisasi cenderung mengadopsi praktik dan prosedur yang dianggap sah oleh lingkungan institusionalnya, meskipun belum tentu meningkatkan efisiensi teknis secara langsung.

Dalam konteks penelitian ini, teori institusional menjadi landasan yang relevan untuk memahami mengapa pelaku UMKM di Kecamatan Sonder belum sepenuhnya menerapkan SAK EMKM. Penerapan standar akuntansi ini sejatinya merupakan respons terhadap berbagai tekanan institusional: tekanan koersif dari regulasi pemerintah dan persyaratan lembaga keuangan formal, tekanan mimetik dari sesama pelaku usaha yang lebih maju, serta tekanan normatif dari Ikatan Akuntan Indonesia. Ketika tekanan-tekanan ini belum dirasakan secara nyata oleh pelaku UMKM, maka kecenderungan untuk menerapkan SAK EMKM pun melemah.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)

Penyusunan laporan keuangan menurut SAK EMKM dilandasi oleh tiga asumsi dasar. Pertama, dasar akrual, di mana aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban diakui ketika memenuhi definisi dan kriteria masing-masing akun. Kedua, kelangsungan usaha, yang berarti laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas akan terus beroperasi di masa mendatang. Ketiga, konsep entitas usaha, yaitu keuangan usaha harus dapat dipisahkan secara tegas dari keuangan pribadi pemilik (IAI, 2016).

Penerapan SAK EMKM yang baik setidaknya mencakup tiga aspek utama: pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip dasar SAK EMKM, kemampuan teknis dalam menyusun ketiga jenis laporan keuangan yang disyaratkan, serta konsistensi dalam penerapan kebijakan akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya. Simanjuntak, Sumual, dan Bacilius (2021) menegaskan bahwa konsistensi penyusunan laporan keuangan merupakan aspek krusial dalam implementasi SAK EMKM.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan kelompok usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha dan memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Berdasarkan undang-undang tersebut, usaha mikro adalah usaha dengan kekayaan bersih maksimal Rp50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan) dan hasil penjualan tahunan maksimal Rp300 juta. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih antara Rp50 juta hingga Rp500 juta dengan penjualan antara Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar. Sementara itu, usaha menengah memiliki kekayaan bersih antara Rp500 juta hingga Rp10 miliar dengan penjualan tahunan antara Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar.

Kendala Penerapan SAK EMKM

Berbagai studi telah mengidentifikasi hambatan-hambatan yang kerap muncul dalam upaya penerapan SAK EMKM di kalangan pelaku UMKM. Hamongsina, Sumual, dan Tala (2022) menemukan bahwa kendala utama meliputi minimnya pengetahuan tentang standar akuntansi, ketiadaan dukungan teknis dari pihak eksternal, keterbatasan waktu karena pelaku usaha lebih fokus pada kegiatan operasional harian, dan anggapan bahwa penyusunan laporan keuangan sesuai standar terlalu rumit dan tidak memberikan manfaat langsung. Temuan dari Lumban Aritonang, Harmain, dan Nurwani (2023) juga sejalan, di mana UMKM yang menjadi objek penelitiannya belum menyajikan laporan keuangan sesuai SAK EMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai kondisi aktual penerapan SAK EMKM pada pelaku UMKM di Kecamatan Sonder, termasuk persepsi, pengalaman, dan hambatan yang mereka hadapi secara langsung.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Fokus penelitian diarahkan pada dua hal utama, yaitu: (1) penerapan SAK EMKM dalam praktik pencatatan dan pelaporan keuangan UMKM setempat; serta (2) kendala-kendala spesifik yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengimplementasikan SAK EMKM.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari sepuluh pihak, yang mencakup lima pelaku UMKM aktif di Kecamatan Sonder (IN-01 hingga IN-05), serta lima informan pendukung yang terdiri dari aparat desa dan pihak terkait. Para informan pelaku UMKM bergerak di bidang usaha yang beragam, mulai dari usaha kuliner/rumah makan, toko kelontong, hingga usaha perdagangan kebutuhan sehari-hari. Seluruh informan pelaku UMKM memiliki latar belakang pendidikan SMA dengan omzet bulanan yang bervariasi antara Rp2 juta hingga Rp20 juta.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam (in-depth interview) yang dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi secara leluasa dari setiap informan; observasi langsung di lokasi usaha untuk mengamati praktik pencatatan keuangan yang sesungguhnya diterapkan; dan dokumentasi berupa pengumpulan catatan keuangan, nota transaksi, dan dokumen usaha yang dimiliki informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kecamatan Sonder

Hasil penelitian lapangan menunjukkan gambaran yang cukup memprihatinkan terkait penerapan SAK EMKM pada pelaku UMKM di Kecamatan Sonder. Secara umum, tidak satu pun dari lima informan pelaku UMKM yang berhasil menyusun ketiga komponen laporan keuangan

yang dipersyaratkan SAK EMKM secara lengkap dan konsisten. Seluruh informan masih berkatat pada pencatatan keuangan yang sangat sederhana, berupa catatan harian pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan di buku tulis biasa.

Untuk laporan laba rugi, situasinya sedikit berbeda. Hanya satu informan, yaitu IN-02 yang mengelola toko kelontong dengan omzet relatif lebih besar, yang telah membuat catatan mendekati laporan laba rugi secara parsial. Informan ini sudah mencatat pendapatan penjualan, harga pokok penjualan, dan beberapa pos beban operasional seperti gaji karyawan, meskipun formatnya belum sepenuhnya sesuai dengan standar SAK EMKM. Pencatatan ini juga dilakukan di buku tulis biasa, tanpa menggunakan aplikasi akuntansi apapun.

Aspek pemisahan keuangan usaha dari keuangan pribadi menjadi salah satu masalah mendasar yang hampir dialami oleh semua informan. Hanya IN-02 yang secara sadar dan konsisten memisahkan rekening bank untuk keperluan usaha dari rekening pribadinya. Dari sisi pengetahuan tentang SAK EMKM itu sendiri, hasilnya juga tidak menggembirakan. Dari kelima informan, hanya tiga yang pernah mendengar istilah SAK EMKM sebelumnya, dan itupun sekadar mengenal istilah tersebut sebatas laporan keuangan tanpa memahami isi maupun substansinya. Dua informan lainnya sama sekali belum pernah mendengar istilah SAK EMKM. Tidak ada satu pun dari informan yang mengetahui bahwa SAK EMKM mensyaratkan penyusunan tiga jenis laporan keuangan. Kondisi ini mencerminkan betapa rendahnya tingkat literasi keuangan dan akuntansi di kalangan pelaku UMKM di Kecamatan Sonder.

Tabel 1. Rekapitulasi Penerapan SAK EMKM oleh Informan

Informan	Pencatatan Keuangan	Lap. Posisi Keuangan	Lap. Laba Rugi	CALK	Pisah Keuangan
IN-01	Ada (sederhana)	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak
IN-02	Ada (terstruktur)	Tidak Ada	Ada (parsial)	Tidak Ada	Ya
IN-03	Ada (sederhana)	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak
IN-04	Ada (sederhana)	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak
IN-05	Ada (sederhana)	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak

Sumber: Data Primer, diolah 2026

Kendala dalam Penerapan SAK EMKM

Temuan penelitian mengidentifikasi lima kelompok kendala utama yang secara sistematis menghambat penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kecamatan Sonder. Kelima kendala ini saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain, membentuk semacam lingkaran masalah yang sulit diputus tanpa intervensi dari luar.

Kendala pertama dan paling dominan adalah keterbatasan pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM tentang akuntansi dan SAK EMKM. Dari kelima informan pelaku usaha, tidak satu pun yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Salah seorang informan mengungkapkan dengan jujur bahwa ia tidak pernah mempelajari akuntansi semasa sekolah dan tidak ada pihak yang pernah mengajarnya cara membuat laporan keuangan yang benar. Kondisi ini selaras dengan temuan Adino (2019) yang menegaskan bahwa tingkat pendidikan dan akses terhadap informasi akuntansi menjadi faktor penentu kemampuan penerapan SAK EMKM.

Kendala kedua adalah hampir tidak adanya sosialisasi SAK EMKM yang menjangkau pelaku UMKM di tingkat kecamatan. Seluruh informan menyatakan dengan tegas bahwa mereka belum pernah menerima sosialisasi, pelatihan, maupun pendampingan terkait SAK EMKM dari pihak mana

pun, baik pemerintah daerah maupun institusi akademis. Kesenjangan informasi ini menciptakan jurang yang lebar antara tuntutan regulasi dan praktik yang berjalan di lapangan. Temuan ini konsisten dengan hasil studi Kautsar dan Rejeki (2020) yang membuktikan bahwa intensitas sosialisasi SAK EMKM berpengaruh langsung dan positif terhadap kemampuan penerapan standar tersebut.

Kendala ketiga bersifat persepsional, yakni keyakinan kuat di kalangan pelaku UMKM bahwa laporan keuangan formal tidak relevan dan tidak diperlukan bagi usaha berskala kecil. Mayoritas informan berpandangan bahwa selama usaha mereka masih berjalan dan menghasilkan penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tidak ada urgensi untuk menyusun laporan keuangan yang terstandarisasi. Seorang informan bahkan menyatakan secara tegas bahwa laporan keuangan semacam itu hanyalah urusan perusahaan besar, bukan untuk pedagang kecil seperti dirinya. Pandangan ini mencerminkan rendahnya kesadaran akan manfaat jangka panjang SAK EMKM, sebagaimana dikemukakan oleh Susilowati dkk. (2021) bahwa persepsi positif pelaku UMKM merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi standar akuntansi.

Kendala keempat adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memahami akuntansi dan terbatasnya waktu yang tersedia untuk menyusun laporan keuangan. Hampir seluruh pelaku UMKM yang diteliti mengelola usahanya sendiri tanpa karyawan yang berlatar belakang akuntansi. Mereka bekerja sendiri dari pagi hingga malam, sehingga tidak ada jeda waktu yang cukup untuk belajar akuntansi, apalagi menyusun laporan keuangan yang lebih kompleks. Keterbatasan ini diperparah oleh kondisi finansial yang tidak memungkinkan mereka untuk merekrut tenaga ahli atau memanfaatkan perangkat lunak akuntansi.

Kendala kelima adalah minimnya akses terhadap teknologi akuntansi. Seluruh informan tidak menggunakan aplikasi atau perangkat lunak akuntansi apapun. Pencatatan dilakukan secara manual menggunakan buku tulis, paling jauh dengan bantuan kalkulator di ponsel. Faktor ketidaktahuan cara mengoperasikan aplikasi keuangan dan rendahnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM menjadi tembok yang menghalangi adopsi teknologi yang sebenarnya dapat sangat membantu proses pencatatan keuangan mereka.

Tabel 2. Rekapitulasi Kendala Penerapan SAK EMKM

No.	Jenis Kendala	Informan yang Mengalami	Kategori
1	Keterbatasan pengetahuan & pemahaman akuntansi	5 dari 5	Sangat Dominan
2	Kurangnya sosialisasi SAK EMKM di tingkat kecamatan	5 dari 5	Sangat Dominan
3	Anggapan laporan keuangan tidak perlu untuk UMKM kecil	4 dari 5	Dominan
4	Keterbatasan waktu dan SDM yang memahami akuntansi	5 dari 5	Sangat Dominan
5	Keterbatasan akses teknologi akuntansi	5 dari 5	Dominan

Sumber: Data Primer, diolah 2026

Pembahasan: Analisis Berbasis Teori Institusional

Jika ditelaah melalui lensa Teori Institusional DiMaggio dan Powell (1983), minimnya penerapan SAK EMKM di Kecamatan Sonder dapat dipahami sebagai konsekuensi dari lemahnya tekanan institusional yang dirasakan oleh pelaku UMKM. Dari sisi isomorfisme koersif, tekanan

regulasi yang secara teori seharusnya mendorong penerapan SAK EMKM belum benar-benar dirasakan dampaknya di lapangan. Tidak ada sanksi nyata yang dialami pelaku usaha akibat tidak menerapkan SAK EMKM, dan akses terhadap kredit mikro masih bisa diperoleh melalui jalur informal yang tidak mensyaratkan laporan keuangan formal.

Dari dimensi isomorfisme mimetik, pelaku UMKM di Kecamatan Sonder tidak menemukan contoh atau model usaha sejenis di lingkungan sekitar mereka yang sudah berhasil menerapkan SAK EMKM. Ketiadaan role model ini menyebabkan dorongan untuk meniru praktik akuntansi yang terstandarisasi menjadi sangat lemah. Dalam kondisi seperti ini, perilaku yang paling rasional bagi pelaku usaha adalah mempertahankan cara lama yang sudah terbukti cukup untuk menjalankan usaha sehari-hari.

Temuan penelitian ini secara keseluruhan memperkuat dan memperluas hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Sejalan dengan Hamongsina, Sumual, dan Tala (2022), penelitian ini menemukan bahwa kurangnya pengetahuan dan minimnya sosialisasi merupakan kendala yang paling dominan. Konsisten dengan Simanjuntak, Sumual, dan Bacilius (2021), ditemukan bahwa bahkan pelaku UMKM yang relatif lebih berkembang sekalipun belum menerapkan SAK EMKM secara penuh. Yang menjadi temuan khas penelitian ini adalah kuatnya hambatan persepsional yang bersifat kultural — yakni keyakinan bahwa laporan keuangan formal bukan urusan pelaku usaha kecil — yang tidak bisa diatasi hanya melalui pelatihan teknis semata, melainkan membutuhkan pendekatan perubahan cara berpikir yang lebih komprehensif dan berkelanjutan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diambil dua kesimpulan utama. Pertama, penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kecamatan Sonder masih sangat terbatas dan jauh dari standar yang dipersyaratkan. Dari lima pelaku UMKM yang menjadi informan, tidak satu pun yang berhasil menyusun ketiga komponen laporan keuangan SAK EMKM secara lengkap — yakni laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Praktik pencatatan yang berlangsung masih sebatas catatan pemasukan dan pengeluaran harian yang sangat sederhana, tanpa pemisahan yang jelas antara keuangan usaha dan keuangan pribadi. Hanya satu informan yang menunjukkan kemajuan lebih baik dengan menyusun laporan laba rugi secara parsial, meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan standar SAK EMKM.

Kedua, terdapat lima kendala utama yang secara struktural dan kultural menghambat penerapan SAK EMKM: (1) keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tentang akuntansi dan SAK EMKM, yang dialami oleh semua informan; (2) hampir tidak adanya sosialisasi SAK EMKM yang menjangkau pelaku UMKM di tingkat kecamatan; (3) anggapan kultural yang kuat bahwa laporan keuangan formal tidak diperlukan untuk usaha berskala kecil; (4) keterbatasan sumber daya manusia yang memahami akuntansi, diperparah oleh keterbatasan waktu dan anggaran; serta (5) minimnya akses terhadap teknologi akuntansi dan rendahnya literasi digital.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini mengajukan beberapa rekomendasi. Bagi pelaku UMKM, disarankan untuk mulai mengambil langkah-langkah kecil namun konkret seperti memisahkan rekening usaha dari rekening pribadi dan membuat catatan keuangan yang lebih terstruktur. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Minahasa, perlu merancang kebijakan konkret berupa program sosialisasi dan pelatihan SAK EMKM yang menjangkau level kecamatan. Bagi Universitas Negeri Manado, khususnya Program Studi Akuntansi, ada peluang besar untuk berkontribusi melalui program pengabdian masyarakat berupa pendampingan akuntansi bagi UMKM. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan

melibatkan lebih banyak informan dan wilayah, atau menggunakan pendekatan mixed method untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Y., Sucipto, D. M., & Orinaldi, M. (2022). Analisis penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah (SAK EMKM) pada usaha mikro kecil menengah Kecamatan Nipah Panjang. Volume VII No. I Januari–Juni 2022, 55–71.
- Hamongsina, K. D., Sumual, F. M., & Tala, Y. (2022). Analisis laporan keuangan UMKM berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah (studi kasus pada Kapal Motor Sirene). Jurnal Akuntansi Manado, Vol. 3 No. 3 Desember 2022, 376–386.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Jakarta: DSAK-IAI.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Jakarta: IAI.
- Simanjuntak, N. H., Sumual, T. E., & Bacilius, A. (2021). Penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK-EMKM (studi kasus pada UMKM Restoran Delli Tomohon). Jurnal Akuntansi Manado, Vol. 1 No. 3 Desember 2020, 35–44.